



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERTANIAN  
**UNIT KERJA** : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHAMMAD ALWI MUSTAHA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 837999

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	407.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m <sup>2</sup> /105 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
2. Tanah Seluas 199 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KENDARI, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m <sup>2</sup> /22 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KONAWE SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	121.000.000
1. MOTOR, HONDA AFP12W21COR M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3 M/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	270.887.768
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	798.887.768
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	798.887.768

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.